

**Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan
Kepala Daerah Kabupaten Tasikmalaya**

¹Ali Irawan

²M. Januar Ibnu Adham

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang

²Universitas Singaperbangsa Karawang

¹aliirawan5@gmail.com

²m.januar.ibnuadham@fkip.unsika.ac.id

ABSTRACT

The research was motivated by the procedures for the general election or the Election, with the existence of Law No. 32 of 2004 concerning regional governments, Governors, Regents and Mayors previously elected by the Regional People's Representative Council (DPRD), now democratically elected directly by the people, through the election process Regional Head who later became known as the Regional Election. The mechanism for direct election of Regional Heads as contained in Law No. 32 of 2004 is expected to be a bridge between the people and their government. The approach in this research is to use a qualitative descriptive analysis, where the data collection process is carried out by interview, observation and document study. Furthermore, it is done by analyzing the data which includes data identification, reduction, data, and drawing a conclusion. In the results of the study below, it was found that the form of Participation carried out by the customary community of Kampung Naga can be classified into the form of conventional participation. Conventional participation activities are a normal form of democracy which includes election activities, namely voting, and political discussion. The form of political participation by informants of the Kampung Naga indigenous people is seen from their nature, which leads to autonomous participation. "Autonomous participation is participation that is not mobilized or is independent"

Keywords: Democracy, Citizen Participation, Elections

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh tata cara pemilihan umum atau PEMILU, dengan adanya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekarang dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat, melalui proses pemilihan Kepala Daerah yang kemudian dikenal dengan istilah Pilkada. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung seperti yang dimuat dalam UU No 32 tahun 2004 diharapkan menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintahannya. Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis

deskriptif kualitatif, dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Selanjutnya dilakukan dengan analisis data yang di dalamnya meliputi identifikasi data, reduksi, data, dan penarikan sebuah kesimpulan. Pada hasil penelitian dibawah ini ditemukan bentuk Partisipasi yang dilakukan masyarakat adat Kampung Naga bisa digolongkan kedalam bentuk partisipasi Konvensional. Kegiatan partisipasi konvensional merupakan bentuk demokrasi yang normal dimana di dalamnya termasuk kegiatan pemilihan yakni memberikan suara, dan diskusi politik. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan informan masyarakat adat Kampung Naga dilihat dari sifatnya maka mengarah kepada *autonomous participation* (partisipasi yang otonom). “partisipasi otonom adalah partisipasi yang tidak dimobilisasi atau bersifat mandiri”

Kata Kunci: Demokrasi, Partisipasi Warga Negara, Pemilu

Pendahuluan

Pada penelitian ini dilatar belakangi dalam tata cara pemilihan umum atau PEMILU, dengan adanya UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sebelumnya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekarang dipilih secara demokratis langsung oleh rakyat, melalui proses pemilihan Kepala Daerah yang kemudian dikenal dengan istilah Pilkada. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung seperti yang dimuat dalam UU No 32 tahun 2004 diharapkan menjadi jembatan antara rakyat dengan pemerintahannya.

Berkaitan dengan ini, tingkat partisipasi politik masyarakat saat ini nyatanya masih belum sesuai dengan harapan. Di tengah kesempatan dalam mendapatkan hak pilih dalam pemilu.sebagian kalangan masyarakat menanggapinya dengan skeptis, pesimistis, bahkan kemudian bersikap apatis untuk tidak memilih dalam Pilkada. Dengan demikian para pemilih yang memutuskan untuk tidak memilih dalam Pilkada yang lebih dikenal dengan kalangan golongan putih (golput), secara langsung maupun tidak langsung telah menunjukkan bahwa di Indonesia, tingkat partisipasi politik yang ada masih belum berjalan maksimal.

Seperti halnya yang terjadi pada Pilkada Kabupaten

Tasikmalaya yang dilangsungkan pada tanggal 9 Januari 2011, dimana banyak warga Kabupaten Tasikmalaya yang tidak menggunakan hak pilih mereka untuk memilih pimpinan daerahnya. Sesuai data yang didapatkan (<http://www.pikiran-rakyat.com/node/132457>:2011)

“Dari jumlah hak pilih Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1.278.364 orang, pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, diketahui 434.331 yang tidak menggunakan haknya atau golput. Sedangkan jumlah yang menggunakan hak pilih yaitu 844.033 orang, di antaranya 28.209 tidak sah. Suara sah sebanyak 815.824 suara, sedangkan pemenang dalam pemilihan itu pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto meraih 263.099 suara. Jumlah suara golput jauh lebih besar dibandingkan dengan suara pemenang”

Partisipasi politik merupakan suatu keharusan bagi warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Oleh karena itu apabila tidak adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik maka kehidupan demokrasi akan terhambat dalam perkembangannya. Darmawan

(2008:1) mengemukakan bahwa “tidak ada orang yang tidak terlibat dengan politik dan berpolitik adalah penentuan sikap politik terhadap situasi yang sedang berkembang”. Oleh karena itu Aristoteles (Darmawan, 2008:2) menyebutkan bahwa “manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon or man is by nature a political animal*)”. Dalam negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat dalam kegiatan berpolitik itu lebih baik. Sebaliknya, ketika partisipasi politik itu rendah maka tandanya itu kurang baik.

Masyarakat adat yang hidup dalam sebuah lingkungan adat yang sangat dipatuhinya hidup dalam kelompok yang memisahkan diri secara formal dari tatanan budaya pada umumnya diusahakan untuk ikut dalam kehidupan berpolitik yang berbeda dengan kehidupan mereka sebelumnya. Masyarakat adat juga yang sangat kental dalam mempertahankan tradisi-tradisi nya sekarang dituntut untuk bisa aktif dalam kegiatan politik berupa pemilihan Kepala Daerah. Kekhasan budaya masyarakat adat yang dikenal

dominan dengan kearifan budaya lokalnya sangat menarik untuk di kaji ketika dikaitkan dengan kondisi politik yang terjadi sekarang ini.

Kampung Naga menjadi salah satu daerah yang memiliki magnet yang cukup kuat bagi kajian partisipasi politik peneliti, hal tersebut dikarenakan masyarakat disana masih menjaga tradisi-tradisi dan kebudayaannya, meskipun arus modernisasi semakin menyeret daerah-daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, di tambah struktur pemerintah dan adat istiadat yang selalu beriringan dengan baik membuat Kampung Naga menjadi lebih istimewa dan unik.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana tingkat atusias secara deskriptif yang dilakukan oleh masyarakat adat kampong naga dalam pemilihan kepala daerah kabupaten tasikmalaya dalam neraca demokrasi masyarrakat dalam suatu Negara.

Metode

Pendekatan pada penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Penelitian kualitatif terdiri dari asumsi filosofis, strategi, metode pengumpulan data,

analisis data, dan intrepretasi data yang lebih beragam dibandingkan penelitian kuantitatif (Creswell, 2010, hlm. 258). Dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumen. Selanjutnya dilakukan dengan analisis data yang di dalamnya meliputi identifikasi data, reduksi data, dan penarikan sebuah kesimpulan.

Hasil Pembahasan

Bentuk partisipasi politik masyarakat adat Kampung Naga dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, bentuknya lebih beragam, masing-masing informan memiliki pemikiran tersendiri mengenai bentuk kegiatan yang dilakukan dalam mengikuti Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa bagian hasil wawancara dengan beberapa responden dan data lapangan terkait partisipasi politik masyarakat adat Kampung Naga dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam partisipasi politiknya masyarakat adat Kampung Naga ikut serta dalam kegiatan Pilkada yaitu

dengan jalan memilih pasangan calon Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, masyarakat sendiri mengatakan bahwa mereka ikut tetapi tidak ikut-ikutan artinya masyarakat ikut serta dalam menentukan pilihannya dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Masyarakat adat Kampung Naga Dalam Pilkada yang sudah dilaksanakan memberikan suara mereka kepada pasangan calon yang mereka kenal, menurut mereka bagaimana masyarakat bisa memilih dan menentukan pilihannya terhadap orang yang mereka tidak kenali.

Bentuk lain kegiatan partisipasi politik masyarakat adat Kampung Naga dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yaitu dengan jalan mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Neglasi oleh KPUD setempat, Ketika masyarakat tidak bisa hadir untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPUD masyarakat Kampung Naga memilih untuk berdiskusi dengan Kepala adat ataupun masyarakat yang lainnya, dengan jalan ini lah masyarakat lebih paham dengan Pilkada, media masa seperti radio juga sangat membantu

masyarakat untuk mengetahui seputar informasi pilkada yang dilaksanakan di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka juga berpendapat bahwa bahwa ternyata kemajuan perpolitikan Negara Indonesia ini sudah sekian berubah dari apa yang mereka tahu sebelumnya. Namun meskipun demikian mereka beranggapan bahwa kemajuan yang ada kurang begitu terasa terhadap perubahan yang mereka inginkan.

Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Bentuk Partisipasi yang dilakukan masyarakat adat Kampung Naga bisa digolongkan kedalam bentuk partisipasi Konvensional. Kegiatan partisipasi konvensional merupakan bentuk demokrasi yang normal dimana di dalamnya termasuk kegiatan pemilihan yakni memberikan suara, dan diskusi politik. Bentuk partisipasi politik yang dilakukan informan masyarakat adat Kampung Naga dilihat dari sifatnya maka mengarah kepada *autonomous participation* (partisipasi yang otonom).

“partisipasi otonom adalah partisipasi yang tidak dimobilisasi atau bersifat mandiri”

Daftar Pustaka

- Alwasilah, A. Chaedar. (2002). *Pokoknya Kualitatif (Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif)*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Althoff, Philip. Dan Rush, Michael. (1990). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Rineka Cipta.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. 2011. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Budiardjo, Miriam (1982). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Budimansyah, Dasim. 2010. *Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Membangun Karakter Bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmawan, Cecep. (2008). *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Laboratorium PKn Press.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaloh, J. (2008). *Demokrasi dan Kearifan Lokal Pilkada langsung*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Kartono, Kartini. (2009) *Pendidikan Politik (sebagai bagian dari pendidikan orang dewasa)*. Bandung: CV. Mandar Maju

- Lickona, Thomas. 2012. *Character Matters*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Moleong, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Swantoro, F.S. (1997). *Kampanye dan Profile Pemilu 1997*. Analisis CSIS Tahun XXVI, No 2 Tahun 1997.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 Tentang Perubahan Kedua Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.